

## KEBUDAYAAN, KEKERABATAN DAN PERANTAUAN:

### Catatan Atas Tesis Yang Deterministik

Budi Rajab<sup>1</sup>

---

#### Abstract

*In general, research on the migration process of the Minangkabau people evolve around two theses. First, the migration is caused by matrilineal kinship system in which the status and position of male is inferior to that of female. Second, Minangkabau community has a cultural mission that idealizes a desire for male to migrate in order to seek wealth and to gain new knowledge that their homeland cannot provide. However, both theses have profound weaknesses. On the first thesis, if it is true that matrilineal kinship system has driven male to migrate, then in an ethnic group with patrilineal kinship system the contrary should have taken place. But that is not the case. In both kinship systems the majority of migrating people are men. On the second thesis, in a community that has no cultural mission about the purpose of migration, in fact, people still tend to migrate. A study conducted by the writer concluded that both matrilineal kinship system and cultural mission only play as intervening variables which have increased the size of the migration. The main determinant remains rural-urban imbalances in economic development that have attracted people to move to cities.*

Siapa yang tak kenal orang Minangkabau! Hampir di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan tingkat madya (menengah) dan metropolitan, sebagian orang yang berasal dari kelompok etnik (*ethnic group*, suku bangsa) Minangkabau relatif akan mudah dikenali (Schermerhorn, 1996: 12; Barth, 1988: 11)<sup>2</sup>, karena ada ciri “unik” yang menonjol, sebagian

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar jurusan Antropologi FISIP UNPAD

<sup>2</sup> Dengan mengikuti konsep Richard Schermerhorn, di sini kelompok etnik didefinisikan “*as a collectivity within a larger society having real or putative common ancestry, memories of a shared historical past, and cultural focus on one or more symbolic elements defined as the epitome of their peoplehood. Examples of such symbolic elements are: kinship patterns, physical contiguity (as a localism or sectionalism), religious affiliation, language or dialect forms, tribal affiliation, nationality, phenotypical features, or any combination of these. A necessary accompaniment is some consciousness of kind among members of the group.*” Menurut Fredrik Barth, cirri-ciri yang ada pada kelompok etnik tersebut menjadikan ia dapat dibedakan dari kelompok etnik atau populasi lain.

dari mereka berjualan makanan sehari-hari, masakan lauk-pauk dengan bumbu khas yang pedas, yang begitu mengundang selera, “Rumah Makan Padang”<sup>3</sup>. Dari penglihatan banyaknya Rumah Makan Padang, pikiran masyarakat mungkin sampai pada anggapan, bahwa orang-orang Minangkabau termasuk suku bangsa perantau, yang meninggalkan kampung halaman untuk berusaha di “negeri” orang.

Dari anggapan awam itu kemudian komunitas akademis mencoba mencari tahu lebih jauh mengenai kenapa sebagian orang-orang Minangkabau pergi dari tempat kelahiran mereka? Hal-hal apa yang mendorong sebagian orang Minangkabau merantau (*migration*)?

Ciri lain yang juga menonjol dari kelompok etnik Minangkabau, yang karakter ini mungkin tidak begitu banyak dikenali awam, bahwa mereka termasuk suku bangsa besar di dunia yang sistem kekerabatannya (*kinship system*) bercorak matrilineal. Prinsip matrilineal (*matrilineal descent*) adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak perempuan, yang mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya ada di luar batas itu (Koentjaraningrat, 1980: 129). Kajian-kajian tentang etnik Minangkabau yang dianggap suka merantau ada yang mengaitkannya dengan sistem kekerabatan matrilineal ini. Namun tulisan ini mempertanyakan hal itu, apakah memang sistem kekerabatan matrilineal memiliki kaitan langsung dengan perantauan tersebut.

Secara administratif, etnik Minangkabau sebagian besar berasal dan berada di Provinsi Sumatera Barat, yang topografi wilayahnya, terutama di bagian tengahnya, bergunung-gunung, banyak sungai kecil yang berkelok-kelok mengalir, dan juga banyak danau. Mungkin kawasan Sumatra Barat ini sedikit mirip dengan bagian Tengah Dataran Tinggi Propinsi Jawa Barat, Tanah Priangan, di mana Bandung terletak sebagai ibukotanya. Tetapi yang lebih penting dari hal-hal yang berkaitan dengan kondisi alam itu, lebih khususnya apa yang disebut ekosistem, diajukan oleh Clifford Geertz (1983: 12-15)<sup>4</sup>, yang

---

<sup>3</sup> Dari hasil pengamatan penulis, sejak lebih dari satu dekade lalu di beberapa kota di Jawa mulai ditemukan adanya Rumah makan Padang yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang Sunda dan Jawa.

<sup>4</sup> Pada awal tahun 1960-an, Geertz secara kontras memisahkan ekosistem Indonesia ke dalam dua kategori, Indonesia dalam (*inner Indonesia*) dan Indonesia luar (*outer Indonesia*). Indonesia dalam berpusatkan pada cara produksi pertanian pesawahan dengan system irigasi yang relatif teratur, yang umumnya ditemui di Jawa, Bali Selatan dan Lombok Barat, sekitar Danau Toba, di Dataran Tinggi Sumatera Barat, dan di bagian Barat Daya Sulawesi Selatan. Sementara cara produksi pertanian Indonesia luar berpusatkan pada sistem perladangan (*swidden agriculture, shifting cultivation*) yang umum sekali di luar Jawa, meskipun di Jawa sendiri bisa ditemukan juga, seperti di kawasan Banten Selatan dan Priangan Selatan. Namun

memasukkan wilayah Sumatera Barat ini ke dalam ekosistem Indonesia dalam (*inner Indonesia*), yang berpusatkan pada cara produksi pertanian pesawahan seperti yang umum dijumpai pada sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Ekosistem pesawahan di Sumatera Barat sudah ada sebelum zaman kolonialisme Belanda, sehingga menjadi daerah pemasok beras untuk wilayah Sumatera bagian Tengah dan Utara. Karena itu, etnik Minangkabau ini dalam tingkat peradabannya sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat pengairan (*hydraulic society*) yang menetap (*sedenter*) (Wittfogel, 1957). Atau sudah masuk ke dalam peradaban masyarakat petani (*peasant society*), yang salah satu cirinya adalah berkembangnya jaringan sosial-ekonomi yang melewati batas-batas wilayahnya sendiri akibat dari hasil produksinya yang bisa mencapai surplus. Dengan kata lain, dengan surplus yang dapat diraih dari cara produksi pertanian intensif (pesawahan), etnik Minangkabau memungkinkan menjadi masyarakat ekonomi yang melakukan tukar-menukar komoditas secara lebih luas dengan masyarakat lain, sehingga dengan sendirinya mereka menjadi berorientasi ke luar<sup>5</sup>. Tahapan peradaban pesawahan yang sudah dimasuki masyarakat Minangkabau sejak berabad-abad lalu, baik langsung atau tidak, nampaknya ikut mendorong proses perantauan, dan konsep inilah yang akan

---

demikian, sejak tiga dekade terakhir ini, terutama di Sulawesi bagian Tengah dan Utara serta di Sumatera bagian Selatan dan Utara, termasuk juga di Kalimantan bagian Selatan dan Barat telah berkembang sistem pertanian sawah secara besar-besaran, sehingga kategorisasi yang diajukan Geertz itu sudah banyak mengalami perubahan yang berarti.

- <sup>5</sup> Dalam kajian perkembangan peradaban masyarakat, bila suatu masyarakat sudah dapat memasuki tahap peradaban *intensive agriculture* (pesawahan misalnya), maka kemungkinannya dapat mencapai surplus (kelebihan produksi), dari surplus produksi inilah berkembang berbagai unsur budaya yang kompleks, terutama adalah kemungkinan terbentuknya masyarakat negara dengan sistem birokrasi. Tetapi aspek terpenting dari tahap peradaban ini adalah kekuatannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang salah satunya adalah berkembangnya prinsip tukar menukar antar komoditas (*economic exchange*), yang pertukaran itu bisa melewati batas-batas wilayah geografi masyarakat itu sendiri, bahkan bisa terjadi pertukaran antar negara. Dalam konteks itu pula, peradaban ini mendorong pada sebagian warganya untuk lebih mobil, mengikuti arus pertukaran komoditas tersebut. Tesis di bawah ini akan dijelaskan secara agak detil untuk melihat bagaimana peradaban pertanian intensif mendorong pada migrasi atau perantauan yang umumnya bercorak sirkulasi, suatu bentuk migrasi yang tidak permanen, tidak bertujuan untuk menetap. Kajian sejarah ekonomi dan antropologi ekonomi mungkin telah cukup representatif dalam menggambarkan peradaban pertanian intensif ini (Boserup, 1965; Wittfogel, 1957; Service, 1975; Polanyi, 1944). Untuk kajian sejarah ekonomi Indonesia dalam hal pertanian intensif dan pertukaran komoditas yang melibatkan berbagai kelompok etnik di Nusantara, termasuk masyarakat Minangkabau, sejak awal abad ke 14, lihat van Leur, 1960; Schrieke, 1955; Meilink-Roelofs, 1962; Reid, 1992 dan 1999.

menjadi landasan pemikiran penulis dalam upaya menjelaskan fenomena merantau masyarakat Minangkabau tersebut.

Maksud tulisan ini adalah untuk mencermati tesis-tesis yang mencoba menjelaskan faktor penyebab migrasi atau perantauan yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau kelompok etnik tertentu. Ada beberapa kasus penelitian, seperti yang dilakukan Mochtar Naim (1979), Taufik Abdullah (1987), dan Usman Pelly (1994), yang berisikan tesis yang memberi kesan begitu berlebihan dalam menempatkan struktur sosial, khususnya sistem kekerabatan, dan kebudayaan sebagai faktor determinan dalam proses perantauan masyarakat Minangkabau ini. Tulisan ini sesungguhnya hendak mencoba meletakkan penyebab perantauan secara lebih realistik, tidak berlebihan dengan meletakkan satu faktor sebagai kekuatan determinan pendorongnya, dan juga bukan sesuatu yang “unik”, yang hanya dimiliki oleh dan atau melekat dalam sistem kekerabatan dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu.

### **Dorongan Sistem Kekerabatan dan Misi Budaya**

Pertama-tama dalam upaya menelusuri penjelasan mengenai proses perantauan masyarakat Minangkabau bisa ditengok dari hasil penelitian Naim. Di situ Naim melihat bahwa sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau merupakan faktor yang signifikan dalam mendorong berlangsungnya perantauan. Sistem hubungan kekerabatan suku bangsa Minangkabau yang matrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan, yang menyebabkan pihak laki-laki dianggap menempati posisi yang relatif lemah, kurang memiliki kebebasan, serta tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) dalam keluarga. Dalam konteks itulah, perantauan yang dilakukan kaum laki-laki Minangkabau merupakan suatu fenomena “ekspresi pemberontakan” atas sistem kekerabatan matrilineal yang tidak banyak memberi kebebasan kepadanya untuk membentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang mandiri.

Tidak berbeda dengan Naim, Taufik Abdullah (1987: 104-127), juga melihat fungsi merantau sebagai sarana guna mengurai ketegangan internal dari adanya perselisihan antara konsepsi budaya Minangkabau mengenai hubungan antara perorangan dengan masyarakat di satu pihak serta tuntutan struktur kekerabatan matrilineal di pihak lain.

Sementara hasil penelitian Pelly, yang katanya dalam rangka memahami secara lebih komprehensif mengenai proses perantauan masyarakat Minangkabau, mencoba memperluas kajiannya dengan cara membandingkannya dengan tetangganya, suku bangsa Mandailing. Dengan studinya yang tidak sekedar melihat faktor pendorong, tetapi juga membahas

kehidupan perantau di tempat perantauan serta sejauh mana keterikatan mereka terhadap tanah asal. Pelly ingin mempertanyakan dan sekaligus menguji apakah memang sistem kekerabatan matrilineal merupakan faktor yang bermakna dalam mendorong perantauan pada kedua suku bangsa tersebut.

Menurut Pelly, banyak analisis atas tradisi merantau yang memusatkan perhatian hanya pada kondisi internal di kampung halaman yang memotivasi berbagai kelompok etnik untuk bermigrasi. Bagi Pelly cara pendekatan ini hasilnya hanyalah penekanan yang berlebihan pada paradigma *push-pull factors* dan mengabaikan aspek kebudayaan masyarakat, yang sebenarnya cukup dominan dalam memotivasi perantauan. Pelly menyebutkan, bahwa Naim dan Abdullah terjebak pada paradigma yang demikian itu, mereka terlalu memusatkan perhatian pada faktor internal-situasional yang menyebabkan mengapa orang-orang Minangkabau merantau, misalnya konflik dengan, atau tekanan dari, keluarga luas (*extended family*). Kemudian peristiwa PRRI (1958-1960) adalah faktor internal-situasional lain yang dianggap mendorong banyaknya orang-orang Minangkabau meninggalkan kampung halaman.

Pelly menerima kemungkinan bahwa memang ada sebagian orang Minangkabau yang merantau dalam situasi-situasi yang demikian itu, namun data yang ditemukannya tidak secara utuh bisa mendukung hipotesis yang diajukan Naim dan Abdullah itu. Pelly umpamanya mendapati data bahwa para perantau terus mengirimkan uang ke kampung halaman mereka untuk membangun rumah atau membeli tanah bagi istri-istri atau saudara-saudara perempuan mereka, dan mencoba menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk pengembangan kampung halaman. Dan hal itu merupakan manifestasi loyalitas mereka terhadap “misi budaya”, walau cara mereka mengekspresikan loyalitas bisa berubah-ubah menurut strategi adaptasi mereka di perantauan. Juga, kendati hubungan-hubungan suami-istri-anak menjadi lebih kuat di perantauan, hal itu tidak menghasilkan kecenderungan untuk terjadinya penguatan keluarga inti. Banyak orang Minangkabau yang masih hidup sebagai keluarga-keluarga besar dan bangga akan tradisi pola keluarga tersebut.

Dengan kata lain, melalui temuan penelitiannya, Pelly hendak menyatakan bahwa dengan adanya loyalitas perantau terhadap keluarga dan daerah asal mereka, berarti merantaunya orang-orang Minangkabau tidak banyak berkaitan dengan lemahnya kedudukan laki-laki serta konflik-konflik yang timbul akibat dari organisasi kekerabatan Minangkabau yang matrilineal, melainkan ada faktor lain yang mendorong mereka, atau secara lebih luasnya suku-suku bangsa lain, merantau, yaitu apa yang disebut Pelly dengan konsep misi budaya (*cultural mission*).

Menurut Pelly, orang Minangkabau dan juga orang Mandailing yang merantau ke kota Medan, atau ke kota-kota lain, didorong oleh misi budaya

tertentu. Dalam konsepsi Pelly, misi budaya adalah seperangkat tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh anggota suatu masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai dominan dari pandangan dunia masyarakat bersangkutan. Bagi Pelly, misi budaya inilah yang menggerakkan fase-fase awal migrasi dan malahan misi ini tetap berlaku dan berlangsung terus walaupun banyak orang-orang Minangkabau kini memandang daerah rantau sebagai tempat yang permanen.

Dalam pernyataan Pelly, orang Minangkabau merantau dengan membawa misi memperkaya dan memperkuat alam Minangkabau. Di dalam proses merantau fungsi alam rantau adalah untuk memperkaya dan menguatkan alam Minangkabau. Kelompok etnik Minangkabau sangat mendorong kaum muda mereka supaya merantau; namun ketika mereka kembali, mereka harus membawa sesuatu yang berharga bagi keluarga dan daerah asal, berupa harta benda atau pengetahuan, sebagai simbol keberhasilan misi mereka. Apabila mereka tidak membawa sesuatu, mereka tidak akan diterima oleh sesamanya di kampung halaman; mereka dianggap telah gagal menjalankan misi budayanya. Penduduk kampung akan menyebut mereka bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” (*pulang langkitang*) atau mengatakan mereka “begitu perginya, begitu pulangnya” (*baitu pai, baitu pulang*). Penduduk kampung tidak akan menunjukkan muka yang manis bagi para perantau yang gagal dan mereka harus kembali ke daerah rantau dan berusaha lagi atau “larut di rantau dan tidak usah pulang” (*laruit di rantau urang*). Karena itu, menurut Pelly, orang Minangkabau belum akan kembali ke kampung halamannya bila misi perantauannya belum membuahkan hasil, baik dari segi materi maupun pengetahuan. Orang Minangkabau akan sangat malu dan bahkan tidak akan dihargai oleh sesamanya bila pulang ke kampung halaman tidak membawa sesuatu, materi atau pengetahuan, yang dapat dibanggakan.

Dalam konteks misi budaya yang seperti itulah, Pelly mengungkapkan, bahwa pola merantau orang Minangkabau berbentuk *circulation* (Hugo, 1977).<sup>5</sup> Bagi mereka alam rantau hanyalah tempat tinggal sementara (*temporary settlement*), tempat mencari nafkah dan menimba pengalaman untuk bekal hidup nanti di kampung halaman. Karena itu, dapatlah dimaklumi bila investasi dari keuntungan di rantau akan ditanamkan di

---

<sup>5</sup> Sirkulasi (*circulation*) secara umum bermakna berbagai macam gerak penduduk (*territorial mobility*) yang biasanya berciri jangka waktu pendek, repetitive, atau siklikal, di mana orang yang melakukan mobilitas tidak memiliki niat yang jelas untuk mengubah tempat tinggal secara tetap. Seorang sirkulator tinggal di tempat tujuan perantauan untuk periode waktu tertentu, umpamanya seminggu, dua minggu, sebulan atau lebih, atau dengan pola yang kurang teratur diselang-selingi dengan kembali dan tinggal di tempat asal untuk waktu-waktu tertentu pula. Hugo melihat proses migrasi yang berlangsung di Jawa, umumnya bercirikan migrasi sirkuler.

kampung halaman dalam bentuk rumah, tanah, atau usaha ekonomi lain untuk persiapan di hari tua.

Sementara itu, kampung halaman orang-orang Mandailing terletak bersebelahan di sebelah Utara daerah kelompok etnik Minangkabau. Meskipun kedua suku bangsa itu bertetangga, suku Mandailing termasuk salah satu kelompok sub-etnik Batak. Sebaliknya dari orang-orang Minangkabau dalam sistem kekerabatannya, sistem kekerabatan masyarakat Mandailing adalah patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, dengan ikatan sistem marga yang kuat sekali. Tetapi yang terpenting dari studi Pelly yang membedakan suku bangsa Mandailing dengan suku bangsa Minangkabau adalah misi budayanya yang berbeda dan karena itu pula pola perantauannya menjadi berlainan.

Dari pengamatan Pelly, pola perantauan orang Mandailing didasarkan pada misi budaya yang bertujuan untuk perluasan teritorial (wilayah kekuasaan). Bagi orang Mandailing merantau berarti menempati lahan baru dan menguasainya sebagai bagian dari "kerajaan Batak" (*Batak harajoan*). Gagasan kultural dasar masyarakat Mandailing adalah *sahala hasongopan*. *Sahala* adalah sifat *tondi* (semangat sebagai esensi manusia), *hasongopan* berarti sesuatu kualitas yang dihormati sebagai akibat dari dimilikinya *sahala*. Dengan demikian, *sahala hasongopan* adalah kualitas kehormatan yang juga berarti bahwa seseorang itu patut dihargai oleh orang-orang lain. Dan supaya seseorang memperoleh kualitas itu, orang bersangkutan harus mengembangkan *sahala harajoan*-nya. Dalam konsepsi budaya Batak anak, terutama anak laki-laki, dan tanah menyimbolkan kekuasaan dan kekayaan yang mereka anggap sebagai hasil dari harga diri (*sahala hasongopan*) yang diperoleh dari kerajaan (*harajoan*). Karena itu, orang Mandailing merantau dengan moto: "carilah anak, carilah tanah" (*halului anak, halului tano*). Kompleks "harga diri" inilah yang menurut Pelly yang menggerakkan suku Batak merantau untuk mendirikan kerajaan-kerajaan baru.

Karena misi perantauan orang Mandailing adalah meluaskan wilayah kekuasaan, maka dengan cukup kontras berbeda dengan perantauan orang Minangkabau, orang Mandailing, menurut Pelly, merasa tidak harus membawa pulang harta dan pengetahuan ke kampung halaman. Di samping itu, karena misi perantauan orang Mandailing bertujuan memperluas kampung halaman, dalam istilah Pelly disebut sebagai "perantauan yang ekspansionis" dan memiliki tujuan yang permanen. Dalam konteks misi budaya yang seperti itulah, implikasi dari pola perantauan orang-orang Mandailing bertujuan untuk menetap (*permanent settlement*), tidak kembali ke kampung halaman, jadi bukan pola perantauan sementara, yang sirkuler, seperti yang dilakukan orang-orang Minangkabau.

## **Kontinuitas Misi Budaya**

Selanjutnya, dalam studi Pelly itu, dibahas pula bagaimana misi budaya tersebut berperan dalam mendorong pada preferensi lapangan pekerjaan, pilihan wilayah pemukiman, serta afiliasi organisasi di daerah perantauan.

Seperti umumnya dalam pola perantauan yang dapat dikategorikan ke dalam model migrasi sirkuler, menurut Pelly, orang Minangkabau yang merantau ke kota Medan cenderung memilih pekerjaan yang juga sifatnya mobil, seperti menjadi pedagang kaki lima, pedagang makanan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Selanjutnya, pilihan pekerjaan yang mobil ini mempengaruhi pula pada pilihan pemukiman. Umpamanya di kota Medan itu pemukiman orang Minangkabau terkonsentrasi di sekitar pusat-pusat perdagangan. Sementara orang Mandailing, sejalan dengan pola merantaunya yang permanen, maka preferensi pekerjaannya pun cenderung memilih jenis pekerjaan yang tidak mobil. Pekerjaan yang ideal bagi orang Mandailing adalah menjadi pegawai negeri/swasta, polisi, atau militer (*white collars*). Pilihan pekerjaan ini berhubungan pula dengan pilihan pemukiman mereka yang menuju ke wilayah pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk perdagangan.

Dengan menghubungkan misi budaya dan preferensi pekerjaan serta pilihan daerah pemukiman, berarti tesis Pelly berupaya untuk menjelaskan, bahwa akibat dari misi budaya orang Minangkabau yang mendorong pada perantauan yang temporer, maka jenis pekerjaan yang dipilih juga berkaitan dengan jenis pekerjaan yang sewaktu-waktu dapat ditinggalkan; atau jenis pekerjaan sementara yang apabila harta yang dikumpulkan telah dianggap mencukupi pekerjaan itu dapat dilepaskan. Sementara bagi orang Mandailing, karena misi budayanya mendorong pada perantauan yang permanen, preferensi pekerjaan mereka adalah mencari yang mapan, yang menjadi simbol status dari misi budaya yang ekspansionis.

Lebih lanjut, menurut Pelly, misi budaya perantauan dari kedua suku bangsa tersebut, mengimplikasikan pula pada afiliasi atas organisasi sosial di daerah perantauan. Umpamanya para perantau Minangkabau berafiliasi pada organisasi Islam Muhammadiyah yang lebih modernis, yang doktrinnya menekankan agar bekerja keras, berbuat jujur, hidup sederhana, serta tidak boros. Sedangkan afiliasi organisasi orang Mandailing adalah dengan mendirikan Washliyah, suatu organisasi Islam yang konservatif. Organisasi Islam yang mewakili orang Mandailing ini menekankan pada penyesuaian untuk menyelaraskan diri dengan situasi kota Medan yang pluralistik. Menurut Pelly, organisasi sosial yang dimasuki masing-masing suku bangsa perantau itu telah memainkan peranan penting, bukan semata sekedar mengarahkan kegiatan-kegiatan religius, tetapi organisasi itu sebenarnya mewakili identitas suku bangsa serta sekaligus sebagai wadah perantau dalam meningkatkan dan memperluas jaringan kegiatan ekonomi dan politik di daerah perantauan.

Melalui afiliasi organisasi yang dimasuki orang Minangkabau dan orang Mandailing di kota Medan, Pelly ingin menunjukkan, hal itu merupakan implikasi dari misi budaya. Doktrin dan kegiatan Muhamadiyah yang mendorong pada pengembangan usaha ekonomi dianggap Pelly sesuai dengan misi budaya merantau orang-orang Minangkabau, yang begitu menekankan pada usaha pencaharian harta dan pengetahuan. Sementara Washliyah yang tradisionis, yang menekankan pada penjagaan *status quo*, sejalan dengan misi budaya orang-orang Mandailing yang mendorong pada pencarian posisi yang mapan di perantauan.

Pelly melihat juga bahwa pola perantauan orang-orang Minangkabau telah berubah sejak dua dekade lalu. Ada kecenderungan meluasnya tujuan merantau orang Minangkabau, yaitu menjadi menetap (*permanent migration*). Meskipun demikian, menurut Pelly, misi budaya mereka tidak mengalami perubahan, malah ditafsirkan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun orang-orang Minangkabau yang merantau cenderung untuk menetap, mereka tetap tidak melupakan kampung halaman, umpama saja mereka tetap mengirimkan kekayaan (*remittance*) ke kampung halaman. Menurut Pelly, ini berarti bahwa secara tradisional orang Minangkabau masih tetap menunjukkan pemenuhan misi budayanya, yaitu dengan cara mengirimkan kekayaan ke kampung halamannya sebagai simbol keberhasilan di daerah perantauan, guna membangun rumah yang indah umpamanya atau memperluas pemilikan tanah atau mengakumulasi sumber daya ekonomi lainnya, meskipun para perantau tersebut tidak lagi berniat untuk menempati atau mengelolanya.

### **Determinisme Kekkerabatan dan Kebudayaan**

Kajian Pelly mungkin dari segi data nampaknya cukup ditel dalam menggambarkan pola perantauan, preferensi pekerjaan, pilihan pemukiman, afiliasi terhadap organisasi dari orang Minangkabau dan Mandailing, serta juga bagaimana hubungan-hubungan sosial-ekonomi dan sosial-politik antara para perantau dengan suku-suku bangsa lain (khususnya suku bangsa Melayu) di kota Medan. Dengan cukup kontras terdeskripsikan bagaimana masing-masing suku bangsa mempertahankan identitas keetnisannya, dan meskipun nampak di antara mereka menunjukkan adanya hubungan-hubungan yang asosiatif, di balik hubungan itu terlihat juga upaya-upaya untuk mewujudkan kepentingan suku bangsanya sendiri-sendiri. Melalui tinjauan historis, Pelly juga mendeskripsikan dengan cukup lengkap perubahan-perubahan yang berlangsung di kota Medan, suatu kota yang multietnik dan pluralistik dari segi pengelompokan masyarakat, mulai dari masa kolonial sampai sekarang.

Namun demikian, seperti Naim dan Abdullah yang menurut Pelly menekankan pada kondisi internal dalam menjelaskan proses migrasi,

sebenarnya Pelly juga menekankan faktor pendorong merantau itu pada kondisi internal. Kondisi internal yang dikaji Naim dan Abdullah adalah sistem kekerabatan orang Minangkabau yang mengakibatkan peran laki-laki cukup lemah dalam pengambilan keputusan, yang menurut Pelly penjelasan yang demikian itu bersifat situasional; sementara kondisi internal yang ditekankan Pelly adalah pada misi budaya, yang dianggapnya kebudayaan itu tidak situasional tetapi bersifat ajeg (tetap) dalam mendorong terjadinya perantauan.

Keajegan faktor misi budaya ini dibuktikan Pelly dengan menunjukkan pola perantauan orang Minangkabau yang bercorak sirkuler atau sementara, bukan perantauan yang permanen. Di samping itu, perantauan orang Minangkabau bertujuan mengumpulkan pengetahuan dan kekayaan untuk bekal hidup di kampung halaman. Sementara perantauan orang Mandailing bercorak permanen karena misi budayanya mendorong pada perluasan teritorial. Misi budaya yang merupakan landasan dan referensi untuk bertindak bagi para perantau juga mengimplikasikan pada preferensi pekerjaan, pilihan tempat pemukiman, dan afiliasi organisasi. Bahkan menurut Pelly, misi budaya ini tetap hidup dan menjadi rujukan meskipun terjadi perubahan pada pola perantauan orang-orang Minangkabau yang sejak beberapa tahun lalu mulai cenderung menjadi permanen, yang ditunjukkan Pelly dengan tetapnya orang-orang Minangkabau yang menetap di daerah perantauan mengirimkan sebagian kekayaan mereka untuk membangun kampung halaman. Dengan cara pengiriman kekayaan, Pelly melihat bahwa orang-orang Minangkabau yang merantau masih memiliki orientasi pada kampung halaman.

Pelly memiliki anggapan bahwa Naim dan Abdullah begitu berlebihan dalam menjelaskan faktor hubungan kekerabatan sebagai pendorong proses perantauan. Memang, dalam batas-batas tertentu, tesis Naim dan Abdullah pun, katakanlah jauh dari kemungkinan untuk bisa menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai faktor penyebab perantauan tersebut. Oleh karena, *pertama*, bila prinsip kekerabatan matrilineal mendorong kaum laki-laki merantau, karena kedudukannya yang lemah dalam struktur keluarga dan masyarakat, maka hal yang sebaliknya harus terjadi. Artinya, masyarakat yang berprinsipkan hubungan kekerabatan patrilineal, yang menempatkan laki-laki cukup kuat dalam struktur keluarga dan masyarakat, sementara kedudukan perempuan lebih lemah, seharusnya kaum perempuan terdorong untuk melakukan migrasi. Namun demikian, hal itu nampaknya tidak banyak terjadi, umumnya yang melakukan perantauan adalah kaum laki-laki yang berusia muda apa pun sistem hubungan kekerabatannya (Goldscheider: 1985: 468-469).

Pada masyarakat Mandailing atau Batak pada umumnya yang patrilineal, yang berarti kedudukan laki-laki dalam keluarga cukup dominan, ternyata kaum perempuannya tidak terdorong untuk pergi merantau. Malah yang mula-mula pergi dari kampung halaman adalah laki-laki, baru bila mereka

secara ekonomi sudah menunjukkan hasil atau mapan di tempat perantauan, mereka akan memboyong istri dan anak-anaknya. Dalam masyarakat yang berprinsipkan hubungan kekerabatan bilateral, yang idealnya kedudukan laki-laki dan perempuan berdiri sejajar dalam struktur keluarga dan masyarakat seperti pada kelompok etnik Jawa dan Sunda, bila proses migrasi dianggap didorong oleh faktor hubungan kekerabatan, maka seharusnya kaum laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak, terdorong untuk melakukan migrasi. Namun pada kenyataannya, kaum laki-laki yang tetap lebih banyak melakukan perantauan.

*Kedua*, ternyata kita bisa menemukan juga, bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang berprinsipkan hubungan kekerabatan matrilineal yang warga masyarakatnya, terutama kaum laki-laki, tidak pergi merantau, tetapi tetap tinggal di kampung halaman mereka (Goldscheider, 1985: 323-331).

Apakah memang lemah kedudukan laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal itu? Kajian Postel-Coster mengenai kedudukan perempuan di Minangkabau (Postel-Coster, 1987: 225-239), menunjukkan bahwa kedudukan perempuan di Minangkabau dikaitkan secara tradisional dengan wilayah darat (*center*) dan kedudukan laki-laki dengan wilayah rantau (*periphery*). Namun demikian, wilayah darat itu lebih banyak diasosiasikan dengan *domain domestic*, bukan dengan *domain public*, artinya di sini perempuan nampak memiliki kedudukan yang kuat tetapi hanya pada sistem warisan harta pusaka, sementara kekayaan hasil nafkah (harta pencaharian) laki-laki, perempuan tidak memiliki hak untuk menguasainya (von Benda-Beckman, 2000: 181-208). Di samping itu, dalam suatu keluarga luas (*extended family*), yang menjadi pemimpinya adalah *ninik mamak*, saudara laki-laki dari pihak perempuan dan juga bila dilihat pada tingkatan komunitas, yang menjadi penghulu atau kepala nagari selalu berjenis kelamin laki-laki. Dengan melihat pada relasi gender dalam sistem kekerabatan matrilineal yang demikian itu, mungkin kita bisa menyangsikan bahwa kedudukan laki-laki cukup lemah?

Dan *ketiga*, sejak akhir dekade 1970-an, mulai ada kecenderungan kaum perempuan Minangkabau pun pergi merantau, mengikuti kaum laki-laki, apakah itu untuk berniaga atau melanjutkan pendidikan formal. Sementara itu, sistem hubungan kekerabatan kelompok etnik Minangkabau ini tidak mengalami perubahan, tetap berprinsipkan pada sistem hubungan kekerabatan matrilineal (Kato, 1982).

Dengan demikian, rasanya cukup lemah untuk melihat penyebab merantau masyarakat Minangkabau pada sistem hubungan kekerabatan matrilineal, karena secara empiris-komparatif kurang sekali didukung oleh data dan informasi, apalagi untuk masa kini dengan terjadinya migrasi yang dilakukan oleh kaum perempuan Minangkabau. Berarti di sini kita harus mengidentifikasi kemungkinan adanya faktor lain yang ikut mendorong pada

migrasi suatu etnik atau kelompok masyarakat. Bagaimana dengan peran kebudayaan atau lebih tepatnya misi budaya seperti yang diajukan oleh Pelly?

Tesis Pelly pun nampaknya terjebak pada penekanan yang berlebihan pada peran misi budaya atau kebudayaan pada umumnya dalam mendorong proses migrasi itu. Bahkan nampaknya Pelly lebih berlebihan lagi, karena menganggap peran misi budaya ini tidak sekedar mendorong pada proses migrasi, bahkan lebih jauh lagi misi budaya ini dianggap tetap menjadi landasan dan rujukan bagi berbagai tindakan para perantau di daerah perantauan. Malah tesis Pelly itu cenderung lebih deterministik, sepertinya segala hal yang berkaitan dengan proses awal sampai akhir migrasi harus diletakkan dalam konteks misi budaya itu. Mungkin di sini bisa dikatakan, bahwa Pelly telah terjebak pada paradigma *cultural determinism*, yang menganggap bahwa segala tindakan, sikap, dan pikiran orang ditentukan oleh kebudayaan dan kebudayaan itu dipremiskan sifatnya tetap, tidak berubah, sesuatu yang *given*. Bagi ilmuwan yang berorientasi *cultural determinism*, dan ada kecenderungan para antropolog untuk berorientasi demikian, yaitu segala sesuatu dikembalikan kepada faktor kebudayaan. Dan bila kita membaca kajian Pelly dengan cukup kritis sangat kentara, bahwa tindakan, pikiran, dan sikap orang Minangkabau dan Mandailing, baik di tempat asal maupun di perantauan, diupayakan dikembalikan, atau “dicocok-cocokkan”, pada peran misi budaya.

Kemudian Pelly juga mengajukan kesimpulan, bahwa meskipun ada kecenderungan bahwa pola migrasi masyarakat Minangkabau mengalami perubahan, cenderung menjadi permanen, menetap di daerah tujuan, misi budaya itu sendiri tidak mengalami perubahan. Hal ini ditunjukkan Pelly dengan fenomena *remittance* yang tetap berlangsung ke daerah asal, ke kampung halaman. Sebenarnya soal migrasi permanen pada suku bangsa Minangkabau ini harus dilihat secara seksama dari berbagai dimensi.

Sudah lama sesungguhnya migrasi menetap pada sebagian migran Minangkabau terjadi. Sejak masa kolonial ada di antara para perantau Minangkabau yang menetap di daerah tujuan, terutama dilakukan oleh para perantau yang bermaksud melanjutkan tingkat pendidikan ke Perguruan Tinggi dan mereka itu umumnya berasal dari stratum sosial-ekonomi atas. Kemudian, dapat kita temukan pula para perantau laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan dari kelompok etnik lain dan hal ini juga sudah berlangsung sejak lama. Ini membawa konsekuensi, kaum laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan dari etnik lain cenderung untuk menetap di daerah tujuan.

Kelihatannya Pelly tidak membahas mengenai faktor kelas sosial dari para perantau Minangkabau ini. Padahal faktor ini cukup signifikan dalam kaitannya dengan tipe migrasi dan preferensi pekerjaan di daerah tujuan. Dalam kajian-kajian mengenai migrasi temporer, sirkulasi umumnya dilakukan oleh

kelas sosial-ekonomi menengah ke bawah, sementara migrasi yang permanen berkorelasi dengan kelas sosial atas dan yang berpendidikan tinggi. Demikian pula dengan preferensi pekerjaan, para migran yang berasal dari kelas menengah-bawah, cenderung akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang mobil, atau katakanlah mereka akan memilih pekerjaan di sektor informal, bukan di sektor formal yang mapan, yang tidak bisa ditinggalkan sewaktu-waktu. Dengan demikian, tipe migrasi sirkulasi akan berkorelasi positif dengan kelas sosial menengah-bawah dan dengan preferensi pekerjaan yang sifatnya mobil; sementara tipe migrasi permanen cenderung berkaitan kelas sosial atas dan dengan preferensi pekerjaan yang mapan (*white collar*) (Goldscheider, 1985: 455-468).

Dan yang penting juga untuk melihat sejauh mana misi budaya ini fungsional, adalah, seperti telah disinggung di atas, bahwa sejak beberapa dekade lalu para perantau laki-laki Minangkabau tersebut diikuti pula oleh kaum perempuannya. Lalu ada pula sinyalemen, bahwa telah terjadi perubahan di wilayah Sumatera Barat sendiri, bahwa *extended family* mulai memudar dan digantikan dengan *nuclear family*, terutama perubahan itu berlangsung di wilayah-wilayah perkotaannya.

Nah, dengan terjadi peristiwa-peristiwa tersebut mungkinkah misi budaya bisa bertahan dari arus perubahan yang menekannya? Bisa saja memang misi budaya itu masih tetap hidup, tetapi apakah masih fungsional dan aplikatif? Apakah *remittance* masih bisa dipakai sebagai indikator dari tetap hidupnya misi budaya? Masyarakat Jawa yang melakukan migrasi, apakah itu yang bertujuan menetap ataupun yang temporer, juga melakukan *remittance*, dan nampaknya juga berlaku bagi kelompok etnik lain yang bermigrasi (Abustam, 1987). Diperkirakan juga masyarakat Mandailing yang menurut Pelly tujuan perantauannya permanen, juga mengirimkan sebagian harta kekayaannya kepada sanak saudara mereka di kampung halaman. Dengan demikian, fenomena *remittance* tidak bisa begitu saja digunakan sebagai petunjuk bahwa misi budaya masyarakat Minangkabau masih tetap bertahan.

Terutama kritik yang mungkin cukup mendasar atas tesis Pelly itu, apakah mungkin misi budaya bisa tetap bertahan, sementara kaum perempuan Minangkabau pun mulai merantau, yang juga sama jauhnya dengan perantauan yang ditempuh kaum laki-lakinya? Tidakah perantauan yang dilakukan kaum perempuan ini lambat laun akan mengubah misi budaya? Karena misi budaya yang dimiliki kelompok etnik Minangkabau sebenarnya lebih mendorong pada kaum laki-laki untuk merantau, sementara kaum perempuan diharapkan dapat menjaga misi budaya itu di tempat asal (Postel-Coster, 1987). Bagaimana misi budaya bisa dipertahankan bila kelompok yang mempertahankannya juga bermigrasi? Siapa lagi yang akan menjaga misi budaya? Dengan adanya kecenderungan peristiwa itu, memang bisa saja misi budaya tetap hidup, tidak

menghilang, tetapi mungkin sekedar sebagai suatu simbol yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi warga masyarakat Minangkabau.

Dalam mengkaji kedudukan kebudayaan dalam masyarakat, Pelly menempatkan kebudayaan sebagai sesuatu yang aksiomatis, yang sangat tertutup dan final, dalam peranannya sebagai mekanisme kontrol dan orientasi bagi perilaku warga masyarakat pendukungnya. Kebudayaan dianggapnya hidup sepanjang waktu, tidak lekang oleh tekanan dan perubahan zaman. Padahal pada kenyataannya, kebudayaan suatu masyarakat pasti berubah, tidak kekal, yang abadi adalah perubahan itu sendiri! Kebudayaan tidak hanya relatif dalam tataran substansinya, yakni sebagai nilai dan acuan, tetapi juga relatif dalam stabilitasnya. Tetapi memang perlu digarisbawahi di sini, bahwa, dalam hukum perubahan kebudayaan, selalu ada beberapa unsurnya yang tidak hilang begitu saja, hanya unsur-unsur yang masih tertinggal itu mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengikat warga masyarakat pemilik kebudayaan itu.

### **Terbentuknya Masyarakat Ekonomi**

Tesis Pelly, Naim, dan juga Abdullah nampaknya memang tidak mampu sepenuhnya untuk bisa menjelaskan faktor pendorong migrasi suatu kelompok etnik atau masyarakat. Tataran empiris-komparatif dan juga historis kelihatannya tidak mendukung secara akurat pada tesis-tesis yang dikembangkan mereka. Apakah itu sistem kekerabatan maupun kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tidak akan serta merta atau secara otomatis mendorong pada terjadinya perantauan pada masyarakat bersangkutan.

Mungkin dalam melihat fenomena perantauan suatu kelompok etnik kita bisa meletakkannya dalam konteks pendekatan evolusionistik dan historis masyarakat. Menurut Boserup (Boserup, 1965), seorang ahli ekonomi, bila suatu masyarakat sudah memasuki tahap *intensive agriculture* dan *sedenter*, maka sistem ekonomi masyarakat bersangkutan akan menghasilkan surplus dan bertumbuh atau semakin dinamis. Dalam konteks tingkat peradaban, masyarakat yang demikian ini disebut masyarakat petani (*peasant society*) yang kompleks yang melalui surplus dan pertumbuhan ekonominya memungkinkan bisa mendorong pada munculnya suatu negara (*state*) atau kerajaan dan tumbuhnya kota. Bahkan, bila kita meminjam tesis Gordon Childe, penemuan cara produksi pertanian intensif ini dikategorikan sebagai suatu *neolithic revolution*, karena di situ manusia mulai menetap, mulai memiliki banyak waktu luang, sehingga dapat mengembangkan kerajinan dan pertukangan, tulisan, serta kesenian. Dengan penemuan itu, perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik menjadi bertambah cepat, terutama pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada gilirannya mendorong pula terjadinya pertumbuhan kota-kota sebagai tempat berlangsungnya pertukaran berbagai komoditas pertanian dan

industri. Di sinilah terjadi apa yang disebut *urban revolution*. (Service, 1976: 25-27).

Dalam sejarah ekonomi pun, apa yang disebut masyarakat ekonomi yang berorientasi pertukaran atau katakanlah masyarakat pasar (*market society*) mulai terbentuk ketika peradaban masyarakat sudah memasuki tahap cara produksi pertanian intensif. Karena surplus yang dihasilkan dari produksi pertanian itu serta berkembangnya berbagai produk industri (kerajinan) secara imperatif mendorong munculnya tempat-tempat pertukaran dan tempat-tempat inilah yang kemudian menjadi embrio dari apa yang disebut kota. Timbulnya kota-kota tempat pertukaran berbagai komoditas itu juga mendorong pada terjadinya urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang pada awalnya lebih sekedar bertujuan untuk saling mempertukarkan barang-barang ekonomi atau komoditas, dengan tidak bermaksud untuk menetap (Heilbroner, 1982: 61-83). Dengan demikian, sebenarnya migrasi itu sendiri pada awalnya lebih bercorak sirkulasi, pergerakan penduduk dari satu tempat (desa) ke tempat lain (kota) yang tidak bermaksud untuk menetap di tempat tujuan, tetapi sekedar untuk mencari nafkah atau mempertukarkan hasil produksi pertanian dan kerajinan dengan barang-barang ekonomi lain yang tidak dapat diproduksi sendiri di tempat asal tapi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari penduduk bersangkutan.

Bila kita mengamati sejarah perantauan kaum laki-laki Minangkabau, yang secara panjang lebar dibahas dalam buku Naim, memang proses perantauan itu sudah berlangsung lebih dari seribu tahun yang lalu. Tetapi perantauan tersebut nampaknya relatif bersamaan dengan munculnya kota-kota kerajaan pantai di wilayah Sumatera dan ketika kota-kota tersebut semakin berkembang dan membesar, kaum laki-laki Minangkabau yang merantau juga semakin besar jumlahnya (Naim, 1979: 57-90).

Dalam konteks itulah, tampak bahwa masuknya masyarakat ke dalam peradaban pertanian intensif dan pertumbuhan kota-kota telah merangsang masyarakat untuk lebih mobil, dalam arti bergerak secara teritorial, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi. Dan bila kita menelusuri sejarah Jawa pra-kolonial, masyarakat Jawa yang juga sudah mencapai tahap peradaban pertanian intensif lebih dari seribu tahun yang lalu, ternyata cukup mobil. Banyak penduduk Jawa yang berniaga ke tempat-tempat yang jauh, ke Sumatera, Sulawesi, dan ke arah Timur seperti ke Maluku, yang tujuannya adalah untuk mempertukarkan komoditas pertanian dan kerajinan dengan produk kelompok etnik lain, bahkan dengan penduduk dari wilayah luar Nusantara (van Leur, 1956; Reid, 1999).

Hanya ketika kolonialisme Belanda menduduki Jawa sejak abad ke 17, mobilitas penduduk Jawa menjadi relatif tertahan. Kolonialisme Belanda sangat berkepentingan dengan penduduk Jawa yang harus tetap tinggal di wilayahnya, karena tenaganya diperlukan untuk mengeksploitasi komoditas-

komoditas pertanian di tanah Jawa, khususnya kopi dan tebu, yang pada waktu itu sangat laku keras di pasar internasional, yang puncak eksploitasi sistem pertanian intensif itu adalah ketika diberlakukannya tanam paksa (*cultuur stelsel*) (1830-1870). Mungkin pemerintah kolonial Belanda bersama dengan elit penguasa kerajaan-kerajaan di Jawa mengembangkan mekanisme-mekanisme kultural yang bertujuan untuk menstatiskan masyarakat Jawa umpamanya dengan mengembangkan ungkapan-ungkapan kultural, “banyak anak banyak rezeki,” dan “*mangan ora mangan asal ngumpul*” (makan tidak makan tetap bersama). Pengembangan mekanisme kultural tersebut dilandasi oleh kepentingan ekonomi kolonial agar petani Jawa tetap menetap di kampung halaman mereka dan dapat mengerjakan tanam paksa yang dibebankan kepada mereka (Geertz, 1983: 54-87).

Atau mekanisme kultural tersebut bisa juga muncul sebagai respons dari masyarakat petani Jawa sendiri dalam rangka mempertahankan diri dari tekanan ekonomi kolonial yang sangat eksploitatif itu. Dengan tetap bersama-sama tinggal di kampung halaman beban kerja tanam paksa yang berat itu dapat dibagi relatif merata untuk semua penduduk desa. Dalam konsepsi Geertz cara masyarakat petani Jawa bertahan seperti itu disebutnya sebagai *shared poverty* (kemiskinan yang dibagi rata) (Geertz, 1983: 102). Mekanisme sosiologis yang sifatnya defensif itu bisa dikatakan sebagai strategi adaptasi petani Jawa dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi dan politik kolonialisme. Dan mekanisme ini memang cukup adaptif dan fungsional untuk bisa bertahan hidup, tetapi konsekuensinya ekonomi pedesaan Jawa mengalami apa yang oleh Geertz disebut involusi pertanian (*agriculture involution*). Artinya ekonomi pedesaan itu menjadi stagnan, dengan implikasinya tingkat perekonomian masyarakat petani Jawa tetap berada di tingkat ekonomi subsisten, sekedar cukup untuk mempertahankan hidup pada tingkat yang minimal (Geertz, 1983: 83-87).

Sementara itu, sistem ekonomi dan politik ekonomi kolonial Belanda yang eksploitatif di Sumatera Barat malah merangsang migrasi (merantau) besar-besaran dari penduduk Minangkabau ini (Young, 1988: 164). Kaum laki-laki Minang banyak yang merantau ke kota-kota bahkan sampai ke Jawa, pertama-tama adalah untuk menghindari kerja paksa di perkebunan-perkebunan kopi (Naim, 1979: 78-86). Sebenarnya penduduk Jawa pun banyak yang mencoba melepaskan diri dari kerja wajib paksa tersebut dan pergi ke kota-kota, tetapi karena kota-kota kolonial yang tumbuh dan dikembangkan Pemerintah Hindia-Belanda lebih banyak di Jawa, maka migrasi yang dilakukan orang-orang Jawa tidak begitu jauh, katakanlah masih berada di wilayah mereka sendiri. Dan setelah tanam paksa dihapuskan dan kemudian pada awal abad ke 20 diberlakukan politik etis (hutang budi), yang salah satu kebijaksanaannya adalah mendirikan sekolah-sekolah formal bagi penduduk pribumi, tetapi karena pemerintah Hindia Belanda dalam membangun sekolah-sekolah terutama tingkat lanjutan atas dan Perguruan Tinggi itu lebih banyak di

kota-kota di Jawa seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta (Van Niel, 1984: Riclefs: 1988), maka kota-kota di Jawa tersebut menjadi daerah tujuan migrasi dari berbagai wilayah Nusantara, termasuk dari kelompok etnik Minangkabau (Naim, 1979: 89).

Dengan demikian, sistem ekonomi dan politik kolonial sebenarnya semakin membuka peluang dan kesempatan meningkatnya arus migrasi ke kota-kota. Dan memang harus diakui, bahwa di masa pemerintahan Hindia-Belanda banyak kota di wilayah Nusantara ini, terutama di Jawa dan Sumatera, yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi, dan juga pendidikan, dan pertumbuhan perkotaan tersebut telah banyak menarik penduduk dari berbagai wilayah, baik yang dekat maupun yang jauh (Mackie, 1993: 216-232). Dan banyak di antara kaum migran tersebut yang secara ekonomi berhasil dan meningkat kesejahteraan mereka di tempat perantauan, sehingga kesuksesan ini merangsang penduduk lainnya untuk datang ke kota-kota tersebut. Dalam konteks inilah, sistem ekonomi dan politik kolonial telah memunculkan dua prinsip umum proses migrasi. Pertama, migrasi cenderung semakin meningkat dan kedua migrasi menimbulkan perubahan sosial-ekonomi yang kemudian cenderung mempercepat dan memperbesar jumlah migrasi selanjutnya. Dengan kata lain, sistem kolonialisme nampaknya menjadi mensistematisasi, mengintegrasikan, dan melembagakan migrasi sebagai bagian integral dari tatanan sosial masyarakat, bahkan ada kecenderungan mengubah pola migrasi itu menjadi menetap (Goldscheider, 1985: 290-296).

### **Catatan Refleksi**

Dari uraian dan penjelasan di atas ada beberapa catatan kesimpulan sementara yang dapat diajukan di sini. Pertama-tama, bila dilihat dari tingkat peradaban masyarakat, masyarakat mulai mobil, bergerak secara teritorial, ketika masyarakat sudah memasuki tahap cara produksi pertanian intensif, yang memungkinkan terjadinya surplus produksi dan berkembangnya unsur-unsur kebudayaan lain seperti kerajinan. Perkembangan ekonomi dan unsur-unsur kebudayaan itu merefleksikan munculnya tempat-tempat untuk pertukaran komoditas dan tempat-tempat inilah yang kemudian dikenal sebagai daerah perkotaan. Karena itu, kenapa migrasi selalu mengarah ke kota. Sejarah perantauan kelompok etnik Minangkabau dan juga Jawa di masa pra-kolonial secara representatif bisa menggambarkan wilayah tujuan migrasi tersebut.

Sistem ekonomi politik kolonial yang eksploitatif, yang di Indonesia ditumpukan pada pengolahan dan pengelolaan sektor pertanian, ternyata malah merangsang semakin meluas dan bertambahnya arus migrasi penduduk. Ini dimungkinkan, karena pertama, penduduk menghindari beban kerja berat dari sistem tanam paksa; dan kedua, semakin bertumbuhnya banyak kota. Dalam konteks inilah, sistem kolonialisme malah ikut melembagakan proses migrasi

penduduk, tetapi tetap arah tujuan migrasi itu adalah ke kota-kota. Hanya di masa kolonial Belanda itu sepertinya ada perbedaan antara pola migrasi etnik Minangkabau dan Jawa. Karena kota-kota tempat pertukaran ekonomi yang berskala menengah dan besar berkembang di Jawa, maka seolah-olah masyarakat Jawa bukanlah masyarakat yang mobil. Masyarakat Jawa pun sesungguhnya mobil, hanya tempat tujuan mobilitas mereka jaraknya “dekat”, katakanlah masih berada di wilayah mereka sendiri. Sementara migrasi orang-orang Minangkabau jarak tempuhnya cukup jauh, karena kota-kota yang dituju mereka letaknya juga cukup jauh.

Sudah tentu arus migrasi di masa pasca kemerdekaan, apalagi di masa Orde Baru, dengan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi dan semakin banyak tumbuh kota tingkat menengah di berbagai wilayah Indonesia, semakin mempercepat dan memperbesar jumlah arus migrasi, dan migrasi ini tidak lagi hanya melibatkan kelompok etnik Minangkabau, Mandailing, atau Jawa, tetapi dilakukan pula oleh suku-suku bangsa lainnya.

Catatan lainnya, umumnya penduduk yang melakukan migrasi adalah kaum laki-laki, dan nampaknya ini terlepas dari bentuk hubungan kekerabatan suatu masyarakat. Apakah itu pada masyarakat yang bercorak hubungan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, yang melakukan migrasi adalah laki-laki dan juga usia para migran itu umumnya relatif muda. Di sinilah tesis Naim dan Abdullah dalam menjelaskan pola merantau kelompok etnik Minangkabau tidak sepenuhnya didukung oleh kenyataan. Apalagi untuk masa sekarang ini, di mana kaum perempuan Minang pun mulai pergi merantau, sementara sistem hubungan kekerabatannya tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, faktor sistem kekerabatan tidak signifikan untuk bisa dipakai sebagai variabel penjelas perantauan etnik Minangkabau.

Tesis Pelly pun nampaknya kurang bermakna untuk bisa menjelaskan pola merantau masyarakat Minangkabau dan Mandailing itu. Mungkin saja tanpa misi budaya pun orang akan tetap merantau, terutama apabila kondisi alam, sosio-ekonomi, dan sosio-politik di daerah asal sudah tidak dapat lagi menyediakan nafkah yang layak dan tidak aman. Umpamanya masyarakat Bima dan Lombok yang tidak memiliki misi budaya merantau, ternyata berani menantang samudera supaya bisa sampai di negeri Jiran, Malaysia. Di samping itu, tesis Pelly itu tidak mengungkapkan kelas sosial dalam kaitannya dengan tipe migrasi dan preferensi pekerjaan. Secara signifikan akan nampak adanya perbedaan tipe migrasi dan preferensi pekerjaan bila hal itu dikaitkan dengan kelas sosial para perantau.

Sebenarnya hasil penelitian Naim dengan cukup ditel membahas faktor-faktor non-budaya yang mendorong proses migrasi, yang dalam karya Pelly tidak banyak disinggung. Bahkan kajian Naim itu juga melakukan komparasi dengan kelompok etnik lain untuk melihat sejauh mana faktor-faktor non-budaya dan sistem kekerabatan masyarakat mendorong atau menghambat

migrasi. Hanya kemudian Naim kembali menonjolkan sistem kekerabatan sebagai faktor yang melembagakan perantauan kaum laki-laki Minangkabau ketimbang kelompok-kelompok etnik lain (Naim, 1979: 228-299).

Bila demikian halnya, di mana peran prinsip hubungan kekerabatan dan misi budaya dalam perantauan kelompok etnik Minangkabau ini? Atau secara umumnya, apakah sistem kekerabatan dan kebudayaan masyarakat memiliki makna dalam mendorong proses migrasi suatu kelompok etnik atau masyarakat?

Dalam konteks proses migrasi, sistem kekerabatan dan kebudayaan nampaknya lebih banyak berperan sebagai faktor yang mengantarai, bukan faktor yang mengawali atau menentukan. Seperti telah disinggung di atas, bahwa masyarakat petani yang *sedenter* di dalam dirinya sudah melekat kecenderungan untuk bergerak secara sirkulasi dalam rangka pertukaran ekonomi, terutama menuju ke wilayah perkotaan. Bila masyarakat petani itu memiliki sistem kekerabatan yang bercorak matrilineal, maka kaum laki-laki yang melakukan mobilitas teritorial akan besar jumlahnya. Demikian pula, bila masyarakat petani itu memiliki misi budaya yang memang mendorong pada penduduknya supaya mencari pengetahuan dan kekayaan, maka penduduk yang meninggalkan kampung halaman secara kuantitas akan besar juga jumlahnya. Dengan demikian di sini, peran sistem kekerabatan dan kebudayaan adalah mendorong pada meningkatnya dan atau memperbesar jumlah penduduk yang bermigrasi. Sebaliknya, bila prinsip hubungan kekerabatan masyarakat bersifat patrilineal dan tidak memiliki misi budaya yang mendorong pada pencaharian kekayaan dan pengetahuan, maka warga masyarakat yang melakukan sirkulasi mungkin relatif kecil jumlahnya. Dengan kata lain, sistem kekerabatan dan kebudayaan ini secara metodologis berperan sebagai variabel antara (*intervening variable*) yang bisa memperbesar atau memperkecil penduduk yang melakukan mobilitas teritorial.

Di samping itu, yang juga sangat penting diperhatikan adalah letak dari wilayah perkotaan yang menjadi tujuan migrasi. Letak dari wilayah-wilayah perkotaan akan mempengaruhi dekat-jauhnya perantauan yang ditempuh.

Dalam konteks tesis itulah barangkali kita juga menjadi bisa menjelaskan mengapa suku-suku bangsa, seperti suku bangsa Jawa atau suku bangsa lainnya, yang tidak memiliki prinsip hubungan kekerabatan matrilineal dan misi budaya yang berorientasi ke luar, migrasi di antara warga suku bangsa tersebut tetap berlangsung, meskipun mungkin secara relatif kuantitas yang merantau kecil. Sementara bila sistem kekerabatan dan kebudayaan ditempatkan sebagai faktor determinan, maka masyarakat yang tidak memiliki prinsip hubungan kekerabatan matrilineal dan misi budaya yang mendorong perantauan, di antara warganya tidak akan ada yang pergi merantau.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1987. "Adat dan Islam," dalam Taufik Abdullah (Penyunting), *Sejarah dan Masyarakat; Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Abustam, Muhammad Idrus. 1989. *Gerak Penduduk, Pembangunan, dan Perubahan Sosial*, Jakarta, UI-Press.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta, UI-Press.
- von Benda-Beckman, Franz. 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial; Kesenambungan dan Perubahan dalam pemeliharaan Hubungan-hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*, Jakarta, Grasindo.
- Boserup, Ester. 1965. *The Conditions of Agriculture Growth*, Chicago, Aldine.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta, Bhartara Karya Aksara.
- Goldscheider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Heilbroner, Robert L. 1982. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, Jakarta, Ghalia.
- Hugo, Graeme J. 1977. "Circular Migration," dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, XIII (3).
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliny and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Cornell, Cornell University Press.
- Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat.
- van Leur, J.C. 1960. *Indonesian Trade and Society*, Bandung, Sumur Bandung.
- Mackie, J.A.C. 1993. "Regional Demographic History as a Clue to Socio-Economic Changes; The Residency of Surabaya 1890-1900 as a Case Study," dalam Thomas J. Linblad (ed.), *New Chalanges in the Modern Economic History of Indonesia*, Leiden, Program of Indonesia Studies.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 1962. *Asian Trade and Eropean Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague, Martinus Nijhoff.
- Naim, Mochtar. 1979. *Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Jakarta, LP3ES.

- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi; Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta, LP3ES.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*, New York, Holt, Rinehart & Winston.
- Postel-Coster, Els. 1987. "The Image of Women in Minangkabau Fiction," dalam Elsbeth Locher-Scholten and Anke Niehof (ed.), *Indonesian Women in Focus*, Dordrecht\_Holland, Foris Publications.
- Reid Anthony. 1992. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 - 1680; Tanah di Bawah Angin*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. 1999. *Dari Ekspansi Hingga Krisis; Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 – 1680*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ropke, Jochen. 1988. *Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan Ekonomi dan Prilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Gramedia.
- Schermerhorn, Richard A. 1983. "Ethnicity and Minority Groups," dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.), *Ethicity*, Oxford, Oxford University Press.
- Schermerhorn. 1978. *Comparative Ethnic Relations*, Chicago, The University of Chicago Press.
- Schrieke, B.O.J. 1955. *Indonesian Sociological Studies*, The Hague, van Hoeve.
- Service, Elman R. 1975. *Origins of the State and Civilization; the Process of Cultural Evolution*, New York, Norton.
- Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Wittfogel, Karl. 1957. *Oriental Despotism*, New Haven, Yale University Press.
- Young, Kenneth R. 1988. "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat; Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu Politik," dalam Anne Both, J. O'Malley, dan Anne Weidemann (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta, LP3ES.

